



KONTRAK BERJANGKA

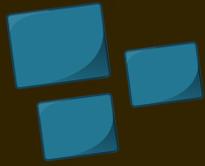
Buletin Kontrak Berjangka
10th
2001-2011

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS

World Bank Dukung
PBK Indonesia ■
PLKA Jatim
Revitalisasi Pasar Lelang ■

**PEMERINTAH & DPR
BAHAS RUU PBK**





DARI REDAKSI

Pemerintah dan DPR telah bersepakat untuk membahas perubahan UUU No.32/1997, tentang perdagangan berjangka komoditi. Dan UUU No 9/2006, tentang sistem resi gudang. kepastian itu setelah Presiden RI menyampaikan surat No.R-02/Pres/01/2011, tertanggal 7 Januari 2011, dan surat dengan No. R-01/Pres/01/2011, tertanggal 7 Januari 2011, kepada Ketua DPR RI.

Pada surat itu pula, Presiden menugaskan Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu dan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan dua undang-undang tersebut bersama DPR. Dengan penugasan yang dilimpahkan kepada pembantu presiden tersebut, Marie Elka Pangestu, juga menugaskan secara khusus Kepala Bappebti, Kementerian Perdagangan, Syahrul R. Sempurnajaya, sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan RUU SRG bersama DPR. Sedangkan yang wakili pemerintah dalam pembahasan RUU PBK, ditugaskan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Deddy Saleh.

Pada saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, 2 Februari 2011, Menteri Perdagangan, Marie Elka Pangestu, juga menyampaikan pandangan pemerintah terhadap dua RUU yang merupakan inisiatif DPR. Pandangan pemerintah tersebut diharapkan bisa memperkaya dan memperluas substansi undang-undang yang akan diamandemen DPR.

Untuk RUU PBK, pemerintah setidaknya memiliki empat poin yang perlu diperhatikan saat dilakukan pembahasan. Yakni, pertama, cakupan kegiatan bursa berjangka saat ini tidak hanya kontrak komoditi primer. Melainkan juga mencakup transaksi komoditi non primer atau yang lazim disebut

sebagai intangible commodities. Kontrak komoditi ini antara lain kontrak-kontrak finansial, jasa-jasa (services), dan carbon trading.

Kedua, perlu adanya penambahan kata “turunannya” dalam berbagai pasal atau ayat yang mengatur mengenai “komoditi”. Ketiga, pengaturan bursa berjangka harus terbuka dimiliki oleh berbagai pihak. sehingga dapat merangsang minat institusi lain untuk ikut berpartisipasi dan berperan dalam memajukan bursa berjangka.

Keempat, pemerintah berpendapat perlu diatur secara tegas dan jelas bahwa lembaga kliring berjangka dapat lebih dari 1 (satu).

Sementara itu, pandangan pemerintah terhadap RUU SRG inisiatif DPR, setidaknya ada tiga pandangan. Pertama, pemerintah berpendapat perlu diberikan panduan dan kepastian sumber modalan bagi Lembaga Dana Jaminan Ganti Rugi. Kedua, bahwa masih perlu memperhatikan pengaturan tentang kesepakatan dan aspek legal penjaminan dan komoditi yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang serta pelaksanaan teknisnya di lapangan

Sedangkan yang ketiga, mengacu pada asas penyusunan peraturan perundang-undangan yang sifatnya berlaku untuk umum, tidak individual dan berlaku secara terus menerus, bahwa pengaturan mengenai penunjukan nama perusahaan tertentu sebaiknya dihindarkan.

Dengan dikembalikan pemerintah dua RUU tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima, optimis dapat dibahas lebih cepat. Dan ditargetkan pada awal bulan April 2011, dua RUU tersebut dapat disahkan melalui Sidang Paripurna DPR. Semoga! ▲



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Penasihat/Penangggung Jawab: Syahrul R. Sempurnajaya

Pemimpin Redaksi: Nizarli Wakil **Pemimpin Redaksi:** Natalius Nainggolan

Dewan Redaksi: Harry Prihatmoko, Diah Sandita Arisanti, Poppy Juliyanti, Subagyo, Dharmayugo Hermansyah, Sri Haryati, Rizali Wahyuni **Sirkulasi:** Sapin Siswantoro, Katimin.

Alamat Redaksi: Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat. www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail: buletin@bappebti.go.id

DAFTAR ISI

12-13

Pasar Lelang

PLKA Jatim
Revitalisasi Pasar Lelang

20-21

Komoditi

Aroma Nilam
Manjakan Dunia



28

KIPRAH

Tingkatkan
Kepercayaan Investor



Laporan Utama.....4-7

- Pemerintah & DPR Bahas RUU PBK
- Pandangan Pemerintah Terhadap RUU PBK
- Pasal Lembaga Kliring Kembali Ke naskah Asli
- Arah Kebijakan Kemendag 2011

Berjangka8-11

- World Bank Dukung PBK Indonesia
- 5 Besar Pialang Anggota BKDI
- Mengenal PBK Sejak Usia Dini

Agenda.....14-15

Aktualita16-17

- Dua 'PR' Retno Untuk Robert
- BKDI Perpanjang Masa Perdagangan GOLDGR
- JFX Luncurkan Kontrak Emas Mini
- Bappebti Siapkan Sanksi Tahap Dua

Analisa.....18

- Harga CPO Fluktuatif
- Emas Makin Berkilau

Info Harga19

Break News22-23

- Paper Price Information SMS Service
- The Movement Of Indonesia Two Futures Exchange
- COFTRA Requires Education Division In Exchange
- Government Will Develop WRS In Banten Area

Wawasan24-25

- Pandangan Hukum Islam Terhadap PBK

Kolom26-27

- Komoditi Murabahah New Insight Of Jakarta
Futures Exchange



Pemerintah & DPR Bahas RUU PBK

Pemerintah bersepakat dengan DPR RI untuk membahas RUU PBK agar memiliki landasan hukum yang lebih kuat bagi industri perdagangan berjangka untuk bergerak lebih maju. Dan, cepat menampung kepentingan pengembangan perdagangan berjangka di masa datang.

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU No. 32/1997, tentang perdagangan berjangka komoditi (PBK) merupakan RUU inisiatif DPR, yang disampaikan oleh Ketua DPR RI kepada Presiden RI dengan surat No. LG.01.03/9463/DPR RI/XII/2010, tertanggal 23 Desember 2010. Surat tersebut isinya memuat permintaan DPR RI kepada Presiden RI untuk membahas RUU tentang Perubahan Atas UU No. 32/1997, tentang PBK guna mendapat persetujuan bersama.

Selanjutnya, Presiden RI melalui surat No. R-02/Pres/01/2011, tertanggal 7 Januari 2011 kepada Ketua DPR RI menyampaikan bahwa menteri yang ditugaskan untuk membahas RUU ten-

tang Perubahan Atas UU No. 32/1997, tentang PBK adalah Menteri Perdagangan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

"Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan kami mewakili Bapak Presiden untuk menyampaikan pandangan Presiden terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU No. 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi," jelas Marie Elka Pangestu, saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, 2 Februari 2011.

Dalam paparan Menteri Perdagangan, Marie Elka Pangestu, perdagangan berjangka komoditi sebagai sarana pengelolaan risiko harga serta tempat pembentukan harga yang efektif dan transparan mempunyai peran strategis

dalam mewujudkan sistem perdagangan nasional yang efisien dan efektif.

Agar PBK dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan, serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan PBK, maka kegiatan PBK harus dilandasi dengan perangkat hukum yang kuat. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia sangat berkepentingan di PBK.

"Alasan utamanya adalah karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil dan pengeksport komoditi primer dunia di pasar internasional. Di samping itu, semakin berperannya produk-produk finansial dan jasa di dalam perekonomian Indonesia yang semuanya itu dikelompokkan sebagai komoditi yang diperjualbelikan di berbagai bursa berjangka dunia," kata Mari.

Demutualisasi

Fungsi ekonomi dari PBK adalah sebagai sarana lindung nilai (hedging), sarana penciptaan harga (price discovery) dan sebagai rujukan harga (price reference) yang transparan yang akhirnya dijadikan referensi harga dunia. Melalui peran serta dalam kegiatan perdagangan berjangka di bursa berjangka, maka para pelaku usaha baik petani kecil, produsen, pedagang maupun eksportir dapat terlindungi dari risiko terjadinya fluktuasi harga melalui lindung nilai (hedging). Untuk menjamin terlaksananya fungsi bursa sebagai sarana lindung nilai untuk mengatasi gejolak harga maka diperlukan UU yang kuat.

Lebih jauh dikatakan, UU No. 32/1997 tentang PBK belum cukup memadai untuk merespons atau menampung perkembangan yang begitu cepat. Khususnya terkait dengan cakupan komoditi yang dapat diperdagangkan dalam mekanisme perdagangan berjangka, adanya demutualisasi bursa berjangka, dan perdagangan berjangka secara bilateral di luar bursa berjangka.

"Oleh karena itu pemerintah menyambut baik RUU tentang Perubahan Atas UU No. 32/1997 merupakan inisiatif Pimpinan Komisi VI DPR RI beserta para anggotanya. Kami dengan seksama telah membaca dan mempelajari draft RUU," jelas Mari Pangestu.

Oleh karena itu, dikatakan Mari lebih jauh, kami berpandangan bahwa RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang PBK tersebut sangat visioner dan komprehensif. Kami berkeyakinan bahwa pengaturan dalam RUU tersebut akan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi industri perdagangan berjangka untuk bergerak lebih maju dan cepat serta menampung kepentingan pengembangan perdagangan berjangka di masa datang.

Visioner dan Komprehensif

Tentunya, merupakan harapan kita bersama bahwa suatu saat dengan UU PBK yang telah diubah, kita sudah dapat menjadi negara yang memiliki bursa berjangka yang dapat menetapkan harga referensi dunia untuk komoditi tertentu. Serta, dapat menyediakan sarana pengelolaan resiko sesuai dengan fungsi bursa berjangka.

“Yang lebih penting lagi adalah bahwa amandemen UU PBK ini akan

membuka akses selebar-lebarnya untuk pengembangan bursa berjangka yang memperdagangkan kontrak-kontrak derivatif dimana Indonesia sangat berkepentingan seperti carbon trading, jasa-jasa dan interest rate yang selama ini tidak dapat ditampung oleh UU No. 32/1997,” papar Marie.

Setelah mempelajari dengan seksama draft RUU Perubahan Atas UU No. 32/1997, tentang PBK yang disampaikan kepada Presiden, kami berkesimpulan bahwa materi perubahan-perubahan

yang dirumuskan dalam RUU tersebut sudah dapat menampung berbagai kepentingan dan perkembangan yang terjadi sekarang serta di masa akan datang.

Dalam kaitan ini pula, kata Mari, kami perlu menegaskan bahwa pemerintah mendukung usulan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 32/1997. Namun demikian, terdapat beberapa materi yang memerlukan perhatian, untuk dilakukan pembahasan bersama yang kebanyakan terkait dengan masalah substansi dan teknis perundang-undangan. ▲

Pandangan Pemerintah Terhadap RUU PBK

1. Dalam perkembangannya, cakupan (coverage) kegiatan bursa berjangka dunia saat ini tidak hanya mencakup komoditi primer, seperti karet, CPO, batu bara dan lainnya, melainkan sudah sangat luas dan mencakup transaksi komoditi non primer atau yang lazim disebut sebagai intangible commodities. Kelompok komoditi antara lain kontrak-kontrak finansial, jasa-jasa (services), dan yang lebih penting lagi carbon trading.

Perkembangan dalam perdagangan berjangka di dunia tersebut terjadi sangat cepat, sementara Indonesia sebagai negara yang memiliki kepentingan di dalam perdagangan berjangka, tidak dapat menikmati keuntungan dari perkembangan tersebut. Hal itu dikarenakan peraturan yang ada saat ini belum lagi dapat menjadi dasar hukum untuk merespons berbagai perubahan yang terjadi. Krisis ekonomi dan keuangan telah menjadi “alarm” untuk Indonesia mengenai pentingnya pengelolaan risiko untuk menghindari kerugian yang besar bagi perekonomian nasional.

Untuk itu pengertian komoditi maupun kontrak berjangka yang akan diperdagangkan dalam perdagangan berjangka komoditi perlu diperluas dan tidak terbatas pada komoditi primer yang digunakan selama ini.

2. Agar maksud dan tujuan perdagangan berjangka komoditi terumuskan dengan baik, pemerintah berpandangan perlu adanya penambahan kata “turunannya” dalam berbagai pasal atau ayat yang mengatur mengenai “Komoditi”.

3. Ketentuan mengenai pengaturan bursa berjangka itu sendiri sifatnya tertutup, sehingga tidak dapat merangsang minat institusi lain untuk ikut berpartisipasi dan berperan dalam memajukan bursa berjangka. Tidak mengherankan kalau kondisi bursa berjangka kita saat ini tidak seperti yang diharapkan bila dibandingkan dengan bursa yang ada di negara lain, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, India dan lain lain.

Dengan demikian, adanya bursa berjangka yang melibatkan banyak pihak di Indonesia akan dapat menciptakan suatu sarana perdagangan yang dapat berperan untuk memungkinkan terjadinya pembentukan harga (price discovery), pengelolaan risiko, peningkatan mutu komoditi, distribusi, dan tersedianya lapangan kerja. Bagi pemerintah yang selama ini disibukkan dengan masalah subsidi, distribusi, pemasaran komoditas strategis, penetapan harga serta penjaminan risiko kerugian, maka dengan bursa berjangka yang baik diharapkan dapat membantu memperlancar dan meningkatkan pertumbuhan di sektor riil yang pada gilirannya dapat menciptakan kesempatan kerja.

Untuk itu pendirian bursa berjangka di Indonesia tidak hanya semata-mata ditujukan untuk para anggotanya saja, tetapi akan tercipta bursa berjangka yang melibatkan banyak pihak dan dapat memberikan keuntungan kepada para pemilikinya.

4. Tanpa mengurangi penghargaan kami atas usulan atau rumusan yang telah dilakukan, beberapa ketentuan dalam RUU tersebut perlu diselaraskan dengan berbagai praktek penyelenggaraan perdagangan berjangka secara internasional (international best practice) dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Untuk itu, beberapa ketentuan perlu diperjelas, misalnya mengenai Lembaga Kliring Berjangka. Kita sangat mengharapkan bahwa di masa mendatang transaksi di bursa berjangka akan semakin meningkat. Selain itu besar kemungkinan bursa berjangka akan tumbuh di berbagai propinsi yang potensial dan sifatnya spesialisasi. Dengan demikian, apabila lembaga kliring berjangka hanya 1 (satu), dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan-kesulitan di masa mendatang.

Karena itu, dalam RUU perlu diatur secara tegas dan jelas bahwa lembaga kliring berjangka dapat lebih dari 1 (satu). Dalam hal adanya pertimbangan bisnis bahwa pasar membutuhkan hanya 1 (satu) lembaga kliring berjangka maka hal tersebut mungkin saja terjadi, sehingga pembatasannya tidak perlu dilakukan dalam Undang-Undang. ▲

Pasal Lembaga Kliring Kembali Ke naskah Asli

Industri perdagangan berjangka sebaiknya hanya memiliki satu lembaga kliring. Sebagai mana layaknya diindustri bursa efek yang yakni PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Di masa lalu, KPEI juga pernah melakukan tugasnya dengan sebagai lembaga kliring dari tiga bursa efek.

Bursa berjangka juga sebaiknya tidak diperkenankan untuk memperdagangkan indeks saham dan forex. Karena kontrak produk keuangan itu lebih tepat diperdagangkan di pasar modal.

Demikian antara lain topik hangat yang diperbincangkan saat Komisi VI DPR RI, melakukan rapat dengar pendapat dengan sejumlah tokoh institusi dan lembaga swadaya masyarakat. Masing-masing, Ketua Umum Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI), I Gde Raka Tantra, Sekretaris Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI), Jusdianto, Direktur PT. Identrust Security International (ISI), Nursalam, Direktur Utama PT. Bursa Efek Indonesia (BEI),

Ito Warsito, Direktur Utama PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Hoesen, dan Sekjen Lembaga Perjuangan Hak Konsumen Indonesia (LPHKI), Jonathan Hutabarat.

Rapat dengar pendapat yang diselenggarakan pada 9 Februari 2011, itu, dilakukan dalam rangka mencari masukan dan memperluas cakupan perubahan atas UU No. 32/1997, tentang perdagangan berjangka komoditi.

Dalam penjelasan Dirut KPEI, Hoesen, dikatakan, bursa berjangka berapa pun jumlahnya akan lebih efisien jika hanya memiliki satu lembaga kliring. Di sisi lain, dengan satu lembaga kliring akan lebih mudah melakukan pengawasan terhadap perusahaan pialang.

"Jika lembaga kliring lebih dari satu, akan memberatkan anggotanya karena harus menanggung beban keanggotaan dari bursa yang ada," jelas Hoesen.

Dari sisi pengawasan dan pembinaan pun, tambahnya, akan lebih. Karena bukan tidak mungkin satu perusahaan pialang melakukan pelanggaran fatal pada satu bursa. Tetapi kare-

na perusahaan tersebut masih menjadi anggota pada bursa yang lain, perusahaan tersebut tetap bisa melakukan aktivitasnya.

"Jadi, jika ada pelanggaran dari perusahaan pialang yang menjadi anggota di beberapa bursa harus ditindak tegas. Sehingga tidak merusak integritas pasar," kata Hoesen.

Lebih jauh dikatakan Hoesen, industri pasar modal Indonesia pernah memiliki lebih dari tiga bursa efek, yakni Bursa Efek Surabaya, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Parareel, tetapi lembaga kliringnya tetap satu yaitu KPEI.

Hal senada juga dikatakan Direktur Utama BEI, Ito Warsito, yang mengatakan di pasar modal kliringnya cuma satu meski dahulu sempat ada terdapat lebih dari satu bursa saham. "Dalam sejarahnya, lembaga kliring hanya satu. Kalau ada dua atau tiga, modal anggota kliring menjadi harus lebih banyak, kolateralnya sesuai jumlah lembaga kliring, kalau satu, kolateralnya hanya satu," papar dia.

"Kami mengusulkan agar lembaga kliring berjangka juga cuma satu, namun untuk kepemilikan saham, sebaik-

nya dimiliki oleh bursa dan bersifat independen. Dengan demikian akan lebih terintegrasi,” tambah Ito.

Terkait dengan itu, Nursalam, mengutarakan, jika lembaga kliring bursa berjangka hanya ada satu akan berisiko tinggi pada integritas perdagangan berjangka. “Karena, bukan tidak mungkin lembaga kliring pun bisa melakukan kesalahan. Kalau itu terjadi maka seluruh pelaku pasar akan terganggu dan merusak tatanan industrinya. Dampak yang lebih besar, tidak ada lagi kepercayaan investor terhadap industri ini,” tegas Nursalam.

“Kami dahulu sudah pernah memiliki pengalaman seperti itu. Lembaga kliring yang seharusnya menjamin dari setiap penyelesaian transaksi investor tidak bisa melakukan tugasnya. Dan, seketika itu pula rontok kepercayaan investor terhadap bursa berjangka,” tutur Nursalam.

Keuntungan lain bila lembaga kliring lebih dari satu, tambah Nursalam, bursa berjangka dapat memilih lembaga kliring yang dapat memberikan layanan terbaik. Dengan demikian akan menciptakan iklim persaingan yang sehat sehingga menghasilkan kinerja yang efisien.

Selain itu lembaga kliring dan bursa berjangka harus memiliki visi dan misi yang sama agar dapat terciptanya integritas keuangan dan pasar.

“Dibeberapa negara maju, lembaga kliring menjadi satu dengan bursa berjangka. Misalnya, di Amerika Serikat, bursa Chicago Mercantile Exchange (CME) memiliki lembaga kliring CME Clear Port,” kata Nursalam.

Sikap Pemerintah

Sementara itu, sikap pemerintah terhadap perbedaan ditetapkan-nya satu lembaga kliring pada industri perdagangan berjangka seperti yang dicantumkan pada RUU

perubahan UU No. 32/1997, tentang perdagangan berjangka komoditi, pasal tentang lembaga kliring dikembalikan pada naskah asli.

“Pemerintah sudah mengusulkan agar rumusan mengenai izin usaha lembaga kliring berjangka dikembalikan ke naskah asli UU No.32/1997, yakni izin usaha tidak hanya diberikan kepada satu badan usaha. Usulan pemerintah itu tercantum dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) atas RUU tentang perubahan atas UU No.32/1997 tentang PBK,” tegas Kepala Biro Hukum Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komditi (Bappebti), Alfons Samosir.

“Jadi, izin usaha yang diberikan kepada lembaga kliring berjangka tanpa pembatasan jumlahnya,” kata Alfons.

“Dalam DIM yang sudah disampaikan ke Komisi VI DPR mengenai RUU atas perubahan UU No.32/1997, kami usulkan agar rumusan ayat 3 pasal 25 tentang izin usaha lembaga kliring dikembalikan ke rumusan asli,” ujar Alfons.

Menurut Alfons, ada sejumlah alasan yang mendasari pemerintah- Bappebti, untuk menetapkan lembaga kliring berjangka tidak hanya satu.

Pertama, untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan berjang-

ka di masa mendatang yang diharapkan melaju dengan pesat.

Terdapat kemungkinan besar di masa mendatang bursa-bursa lokal di provinsi akan muncul dengan spesifikasi masing-masing bursa berjangka dan tentunya dengan lembaga kliring berjangka yang spesialis juga.

Alasan kedua, perkembangan bursa berjangka di masa mendatang akan melibatkan beragam jenis komoditas yang diperdagangkan, yang dalam penjaminan dan penyelesaian transaksinya memerlukan kapasitas permodalan yang besar dan spesialisasi penanganan. “Atas dasar ini, tak mungkin kliring hanya satu,” tutur Alfons.

Alasan selanjutnya, terang Alfons, perlu lembaga kliring lebih dari satu agar dapat melakukan spesialisasi dan memenuhi kebutuhan akan kapasitas permodalan yang besar.

Apabila lembaga kliring cuma satu, katanya, akan menimbulkan kesulitan di masa mendatang dalam hal pengembangan bursa yang spesialis.

“Ini sangat berbeda dengan bursa saham yang memang cuma satu dan sifatnya homogen dan hanya menjual produk efek dalam negeri, sedangkan bursa berjangka, memiliki transaksi ke bursa luar negeri melalui skema penyaluran amanat ke bursa luar negeri (PALN),” imbuh Alfons Samosir. ▲



World Bank Dukung PBK Indonesia

World Bank siap mendukung pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri perdagangan berjangka komoditi.

Tahun 1994, World Bank bekerjasama dengan UNCTAD juga punya peran dalam pengembangan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia yakni melakukan penelitian tentang perlunya sarana pengelolaan risiko bagi pelaku komoditi. Hasil penelitian inilah yang kemudian oleh pemerintah Indonesia merancang perdagangan berjangka komoditi dengan menyusun undang-undang. Setelah industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia berjalan lebih dari sepuluh tahun, World Bank kembali mengulurkan tangan untuk melakukan kajian dampak harga komoditas dan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia.

Niat itu diutarakan Lead Financial Economist, World Bank, Srinivas, dalam kunjungannya ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

(Bappebti), pada 18 Februari 2011. Selain Srinivas, anggota tim World Bank terdiri dari Enrique Aldaz Carroll, Senior Economist dan The Fei Ming, Private Sector Development Specialist. Kunjungan tim World Bank ini diterima Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya dan pejabat Eselon II dan III Bappebti. Selain itu juga dihadiri Dirut Jakarta Futures Exchange (JFX), Made Soekarwo dan Direktur JFX, M. Bihar Sakti Wibowo.

Dalam sambutannya, Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, mengutarakan perkembangan industri perdagangan berjangka dalam sepuluh tahun terakhir. Dikatakan Syahrul, perdagangan berjangka komoditi mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional, yaitu sebagai sarana pengelolaan risiko (risk management) melalui kegiatan lindung nilai (hedging) dan sarana pembentukan harga yang

wajar dan transparan serta alternatif investasi bagi pelaku usaha.

Untuk tujuan itu, berdasarkan UU. No. 32/1997, tentang perdagangan berjangka komoditi, Indonesia telah mengembangkan Bursa Berjangka Jakarta- Jakarta Futures Exchange, yang diresmikan pada 15 Desember 2000. Bursa ini memperdagangkan kontrak Olein dan Kopi Robusta. Kemudian pada tahun 2001, disusul dengan transaksi perdagangan kontrak Emas dan CPO.

Dalam perkembangannya, kontrak CPO dan Kopi Robusta dihentikan perdagangannya pada tahun 2002 karena kurang diminati oleh para pelaku usaha di dalam negeri.

Selanjutnya dijelaskan Syahrul, pada 31 Maret tahun 2010, Bappebti menyetujui pendirian bursa kedua di Indonesia, yaitu PT. Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX) yang memperdagangkan CPO dan Emas.

Perkembangan transaksi komoditi primer di JFX hingga tahun 2009 belum sesuai dengan yang diharapkan, baru mencapai 0.30 % (13.228 lot) dari total transaksi perdagangan berjangka.

“Tetapi dengan berdirinya ICDX, volume transaksi komoiti meningkat menjadi 4.13 % dari total transaksi perdagangan berjangka atau sebesar 232.797 lot,” jelas Syahrul.

“Sebagai salah satu negara produsen utama komoditi di dunia, sekaligus pemasok utama beberapa komoditi primer, seperti komoditi pertanian, perkebunan dan pertambangan, harga komoditi di Indonesia belum dapat menjadi acuan harga komoditi, baik di pasar dalam negeri maupun pasar internasional,” ungkap Syahrul.

Untuk itu, tambahnya, sudah selayaknya Indonesia mempunyai bursa komoditi yang mampu berdiri sejajar dengan bursa-bursa lainnya di dunia, sehingga kehadirannya dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya dalam hal pengelolaan risiko harga melalui lindung nilai (hedging), pembentukan harga (price discovery) dan sebagai sarana investasi.

Menurut Syahrul, terdapat berbagai hal yang menjadi penyebab rendahnya peserta pelaku bisnis- agribisnis dan lembaga keuangan untuk berpartisipasi dalam perdagangan di dalam bursa berjangka di Indonesia yakni kurangnya pengetahuan mengenai perdagangan berjangka komoditi untuk kontrak berjangka multilateral. Pengetahuan yang dimaksud meliputi mekanisme perdagangan berjangka serta risiko dan keuntungan dari memperdagangkan komoditi primer.

Selain itu, kata Syahrul, spesifikasi kontrak berjangka komoditi primer yang diperdagangkan di bursa berjangka kurang menarik. “Masih adanya kesulitan dalam mencari pasar fisik yang dapat menjadi underlying kontrak berjangka komoditi primer.”

Lebih jauh dikatakan Syahrul, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran produk yang

diperdagangkan dari sisi pelaku bisnis- agribisnis, antara lain permintaan dan penawaran dari pelaku sangat berpengaruh dalam suatu bursa berjangka yang sehat. “Ciri-ciri suatu bursa berjangka yang sehat antara lain, harga produk yang diperdagangkan fluktuatif, adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran produk yang diperdagangkan, adanya stok yang cukup dan pasar fisik yang mendukung transaksi perdagangan berjangka komoditi.”

Potensi

Sedangkan komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka harus memenuhi tiga syarat. Yakni, pertama layak teknis. Kelayakan yang berhubungan fisik komoditi seperti grading atau mutu. Kedua, layak pasar, kelayakan yang mengacu pada struktur dan mekanisme pasar komoditi yang ditandai banyak pembeli dan penjual, tidak ada intervensi pasar, komoditas homogen, bebas keluar masuk pasar, informasi sempurna tentang stok, produksi, harga, dan distribusi.

Ketiga, layak ekonomi. Komoditi yang diperdagangkan bursa harus mempunyai nilai ekonomi yang lebih baik apabila dimanfaatkan dalam perdagangan berjangka.

“Dalam pengembangan industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, ada beberapa alasan mengapa Indonesia harus memiliki bursa lebih dari satu,” jelas Syahrul.

Pertama, selama 10 tahun terakhir, JFX menjadi satu-satunya bursa berjangka di Indonesia. Keberadaannya selama ini dianggap masih belum mampu mendorong likuiditas perdagangan berjangka komoditi primer se-

bagai basis referensi harga komoditi dunia dan sebagai sarana pengelolaan risiko (lindung nilai/ hedging).

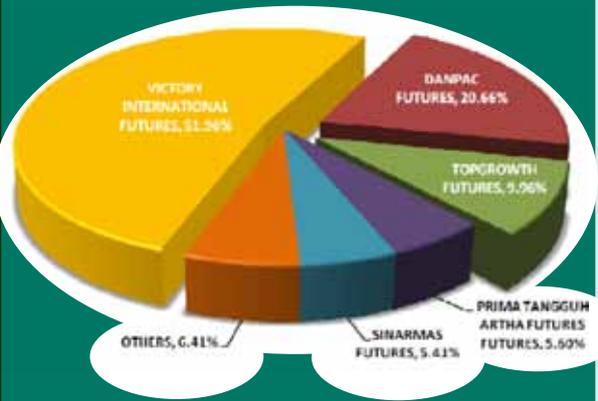
“Oleh karena itu, keberadaan bursa berjangka lain yang memfokuskan pada perdagangan berjangka komoditi primer diharapkan mampu menciptakan persaingan menuju kompetisi bisnis yang sehat dan manajemen perusahaan yang lebih baik dan transparan. Sehingga, Indonesia sebagai produsen komoditi primer utama dunia dapat menjadi negara acuan harga komoditi internasional,” papar Syahrul.

Kedua, praktik kartel komoditi dan monopoli dalam perdagangan komoditi yang masih terjadi di Indonesia diharapkan bisa segera terhapus seiring dengan berkembangnya industri perdagangan berjangka.

Dalam kesempatan itu, Syahrul R. Sempurnajaya, juga mengutarakan potensi pengembangan bursa berjangka komoditi di Indonesia. Dikatakan, Indonesia memiliki komoditi unggulan yang potensial untuk dijadikan sebagai subjek kontrak berjangka, seperti CPO, kakao, kopi, karet, batubara dan timah.

“Selain itu, mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar dan sebagian besar berpartisipasi di sektor pertambangan dan pertanian. Serta, pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan diperkirakan dapat menjadi negara berkembang dengan enormous potential,” tandas Syahrul R. Sempurnajaya. ▲

5 Besar Pialang Anggota BKDI



PT Victory International Futures sepanjang bulan Januari 2011 tercatat sebagai perusahaan pialang yang mencatatkan volume transaksi terbesar di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Volume transaksi yang dibukukan perusahaan pialang ini mencapai 853 lot atau 51,96 persen dari total volume transaksi pelaku pasar BKDI.

Sedangkan diposisi kedua dan ketiga ditempati PT Danpac Futures dengan total transaksi sebanyak 332 lot atau 20,66 persen dan PT Topgrowth Futures dengan transaksi 160 lot, 9,96 persen.

Pada periode Januari 2011, perdagangan BKDI untuk kontrak CPOTR mencapai 42.734 lot atau rata-rata harian sebesar 2.035 lot. Sedangkan untuk kontrak berjangka emas dengan kode GOLDGR total transaksi sebanyak 780 lot dengan rata-rata transaksi harian mencapai 37 lot.

Dirut BKDI, Megain Widjaja, mengatakan, sepanjang bulan Januari 2011 para pelaku pasar yang bertransaksi di BKDI mencatatkan volume transaksi sebanyak 43.514 lot. Transaksi sebesar itu dihasilkan dari kontrak CPO

yang diperdagangkan dengan kode CPOTR mendominasi perdagangan dengan total volume transaksi mencapai 98 persen atau 42.734 lot. Sedangkan kontrak emas- GOLDGR sebanyak 780 lot atau sekitar 2 persen.

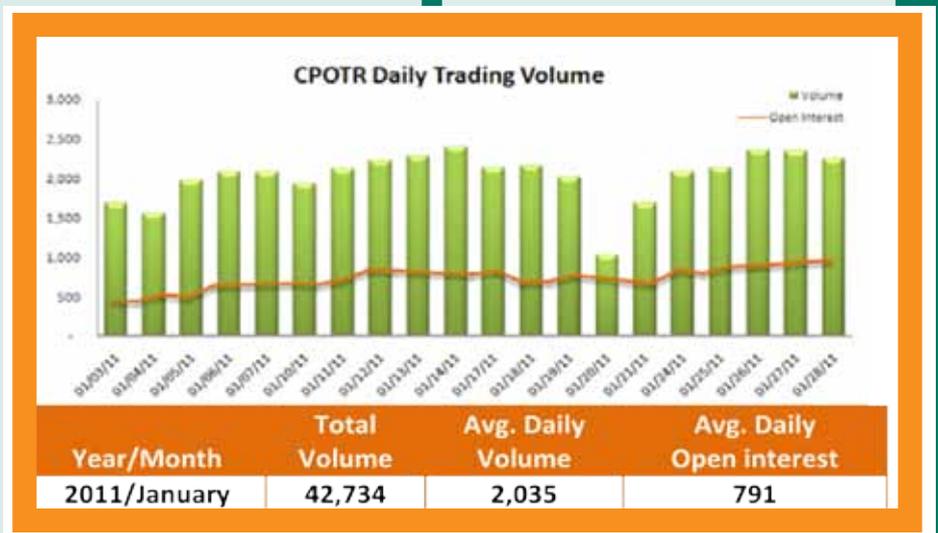
Sementara itu, rata-rata transaksi harian pada Januari 2011 mencapai 2.072 lot, turun sebesar 3,04 persen dari rata-rata transaksi harian pada bulan periode Desember 2010. Sedangkan total open interest sebanyak 17.786 lot.

“Memang terjadi penurunan rata-rata transaksi harian sepanjang bulan Januari lalu, tetapi itu masih di-

national (ISI), Nursalam, mengatakan, nilai transaksi harian kontrak CPOTR di BKDI mencapai rata-rata Rp 275 miliar.

“Nilai transaksi itu dihasilkan dari asumsi rata-rata transaksi harian sebesar 2.500 lot kontrak CPOTR, dengan harga dikisaran Rp 10.000 -an, maka nilai transaksi harian mencapai Rp 275 miliar,” jelasnya.

Sedangkan nilai transaksi kontrak emas, relatif lebih kecil karena rata-rata transaksi hariannya juga masih kecil. “Tetapi transaksi kontrak emas cukup signifikan, terlihat dari open interest dan volume transaksi yang terus meningkat,” kata Nursalam. ▲



batas normal. Karena biasanya di awal tahun para pelaku pasar masih ada yang libur dan para pelaku masih meraba-raba pergerakan harga.” Jelas Megain.

Tetapi kami cukup yakni, tambahnya, untuk periode yang akan transaksi para pelaku akan lebih meningkat lagi.

Sementara itu, Direktur Operasional, PT Indentrust Security Inter-



Mengenal PBK Sejak Usia Dini

Mengenal investasi perdagangan berjangka komoditi sejak usia dini merupakan salah satu upaya menciptakan tenaga kerja handal, kritis dan profesional di masa depan. Sebab, seorang calon investor pada praktik perdagangan berjangka harus memiliki modal pengetahuan dasar, berwawasan luas, menyerap berbagai informasi serta memiliki teknik-teknik analisa.

Untuk tujuan itu, PT Fasting Futures, perusahaan pialang berjangka yang berkedudukan di Semarang, Jateng, menyelenggarakan acara bertajuk Index-Forex & Economics Smart Competition, tingkat SMA/SMK Se-Jateng dan DI Yogyakarta. Kompetisi ini diselenggarakan kerjasama antara PT Fasting Futures dengan Fak. Ekonomi, Unika Soegijapranata, Semarang, Jateng, 14 Februari 2011.

Kompetisi rutin yang dilaksanakan PT Fasting Futures tersebut, kali ini diikuti sebanyak 80 peserta dari SMA/SMK di Jateng dan DI Yogyakarta.

Menurut Dekan Fak. Ekonomi Unika Soegijapranata, Prof. Andreas Lako, melalui acara seperti ini generasi muda mendapat wawasan yang benar tentang investasi Index dan Forex, baik dari sisi produk maupun secara teknis.

“Di bangku sekolah atau di tingkat perguruan tinggi sekali pun, belum tentu ilmu bertransaksi perdagangan berjangka bisa didapatkan. Tetapi tentunya dijalar pendidikan formal itu fungsi dari perdagangan berjangka sudah bisa diketahui sebagai salah satu sarana investasi,” jelas Andreas.

Perdagangan berjangka sebagai sarana investasi jelas berbeda dengan judi atau spekulasi, tambah Andreas. Sebab, praktik perdagangan berjangka semuanya sudah diatur melalui undang-undang. “Kalau pun ada pihak yang rugi lebih disebabkan

kurang jeli dalam menganalisa informasi harga dan variabel lainnya yang mempengaruhi dari transaksi tersebut. Dan sebaliknya, dipihak yang untung bukan karena kebetulan tetapi digunakannya analisa dan intuisi pasar,”

Senada dengan itu, Komisaris PT. Fasting Futures, Christian Andre, mengatakan bahwa dengan diselenggarakannya acara ini diharapkan dapat merubah paradigma para generasi muda tentang investasi yang semula dianggap “gambling” namun pada kenyataannya tidaklah benar.

“Investor yang cermatlah yang memperoleh keuntungan dari modal yang mereka tanamkan,” jelas Andre.

Dengan kompetisi seperti ini, tambah Andre, kami berkeinginan menciptakan generasi muda di masa depan yang profesional di bidang perdagangan berjangka komoditi. “Perdagangan berjangka merupakan industri yang potensial digeluti baik saat ini maupun di masa mendatang. Karena, semua sudah tahu Indonesia merupakan negara produsen dari berbagai komoditi dunia.”

“Kami juga menginginkan industri ini di masa depan menjadi salah satu tujuan saluran para pencari kerja profesional di bidang perdagangan berjangka,” tandas Andre.

Di akhir kompetisi yang digelar PT Fasting Futures, hasilkan juara pertama untuk kategori simulasi kontrak index yakni Peter Marvin dari SMU Theresiana I. Kategori ini berhak dengan menerima beasiswa dengan senilai Rp 600.000 serta tropi bergilir dan dan piala tetap.

Sedangkan untuk juara dua diterima oleh Caterina dari SMU Nusaputera dan juara ketiga oleh Robert Gain dari SMU Theresiana I. Masing-masing menerima piala tetap dan beasiswa senilai Rp 500.000 dan Rp 400.000.

Untuk kategori simulasi kontrak forex dimenangkan Agnes Averina dari SMU Theresiana I sebagai juara pertama. Pemenang kategori ini juga berhak dengan menerima beasiswa dengan senilai Rp 600.000 serta tropi bergilir dan dan piala tetap. Sedangkan diurutan kedua dan ketiga dimenangkan Elvan Ezra dari SMU Sedes Sapientiae menempati posisi kedua dan Lianawati dari SMU Theresiana I sebagai juara ketiga. Untuk pemenang dua dan tiga masing-masing menerima piala tetap dan beasiswa senilai Rp 500.000 dan Rp 400.000. ▲



PLKA Jatim Model Revitalisasi Pasar Lelang

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkeinginan kuat meningkatkan sektor pertanian dan perdagangan melalui pasar lelang. Langkah yang ditempuh diantaranya merevitalisasi pasar lelang dengan dikelola secara modern.

Pasar lelang komoditi agro (PLKA) yang diselenggarakan Disperindag Provinsi Jawa Timur, menjadi pioner dalam program revitalisasi pasar lelang yang dibina dan dikembangkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Program revitalisasi PLKA itu telah dibuktikan Disperindag Jatim saat penyelenggaraan pasar lelang yang ke 78 di Pusat Perdagangan Agrobis (Puspa Agro) Jemundo, Sidoarjo, pada 22 Februari 2011.

Salah satu langkah revitalisasi pasar lelang Jatim itu, Disperindag Jatim telah menunjuk dan bekerjasama dengan PT Jatim Grha Utama (JGU), dalam menyelenggarakan pasar lelang ke 78. JGU merupakan salah satu BUMD Jatim. Hingga penutupan transaksi pasar lelang, JGU mencatatkan nilai transaksi mencapai Rp 80 miliar.

Kepala Bappebti Syahrul R. Sempurnajaya, dalam sambutannya saat penyelenggaraan pasar lelang tersebut mengatakan, langkah yang dilakukan Disperindag Jatim merupakan model yang harus dikembangkan penyelenggara pasar lelang di seluruh Indonesia.

"Ini adalah embrio dan akan menjadi pilot project yang akan kami kembangkan di seluruh Indonesia.

Kami akan usulkan kepada Kementerian Perdagangan untuk disosialisasikan ke Disperindag-Disperindag seluruh Indonesia," tegas Syahrul R. Sempurnajaya.

Lebih jauh dikatakan Syahrul, kegiatan PLKA di Jatim sudah dilaksanakan sejak 2003. Kegiatan pasar lelang itu ditujukan untuk meminimalisasi disparitas harga komoditi baik di tingkat petani maupun ditingkat konsumen.

"Langkah ini untuk memutus mata rantai distribusi produk pertanian yang terlalu panjang. Akibat terlalu panjangnya matarantai distribusi itu, disparitas harga sangat tinggi, bisa mencapai 1.000 persen. Dengan fasilitas pasar lelang yang bisa mempertemukan antara petani dan pembeli ini, akan tercipta harga yang tepat dan menguntungkan si petani," jelas Syahrul.

PLKA Modern

Kementerian Perdagangan tambah Syahrul, akan mendorong pemerintah daerah setempat untuk terus melakukan pembenahan berbagai fasilitas yang diperlukan, seperti akses internet dan IT, manajemen dan marketing serta berbagai fasilitas lainnya.

"Harapan kami adalah kelak, Jatim dapat mewujudkan model pasar lelang yang modern, yang memperdagangkan komoditas unggulan setempat secara selektif dan menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli kelas dunia. Di samping itu, penyelenggaraan pasar lelang dapat melakukan sinergi dengan Sistem Resi Gudang (SRG), dimana pelaksanaan pasar lelang akan mendukung pengembangan SRG sebagai sarana tunda jual komoditas yang disimpan," kata Syahrul.

Menurut Syahrul, keberhasilan program revitalisasi pasar lelang di berbagai daerah seyogyanya dibentuk lembaga penyelenggara pasar lelang yang kuat dengan melakukan integrasi dengan kegiatan pasar induk. Dan didukung oleh sarana gedung lelang yang representative, pergudangan yang memadai, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan, laboratorium uji mutu, sarana transportasi, dan lain-lain yang mendukung pengembangan pasar lelang.

Saat ini, ungkap Syahrul, selain Jatim daerah yang sudah merespons keinginan pemerintah untuk merevitalisasi pasar lelang di antaranya pasar lelang Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Medan, Riau dan Palembang.

"Revitalisasi seperti ini akan

kami kembangkan terus tiap tahun. Namun lagi-lagi keberhasilan dan kesiapannya tergantung daerah yang merespons. Meski kita sediakan fasilitas tapi kalau daerah tidak menangkapnya dengan baik, ya tidak akan berhasil,” tegas Syahrul.

Untuk itu, ia berharap animo daerah untuk membentuk dan mengembangkan pasar lelang ini bisa menjadi semakin besar seiring dengan besarnya potensi yang ada, khususnya di sektor agrobisnis.

Khusus untuk pasar lelang komoditas di Jatim, ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi, diantaranya fasilitas teknologi informasi, sosialisasi kepada masyarakat luar, membuat data base yang memuat jumlah pelaku atau pengikut pasar lelang beserta komoditas yang dijual dan mutunya serta manajemen pemasaran.

“Saya yakin, dengan berbagai pembenahan di atas, pasar lelang ini akan bisa meningkatkan kinerja perdagangan antar daerah dan antar pulau Jatim. Bahkan bisa juga ekspor, karena pembeli tidak hanya dari wilayah Jatim. Dan kalau ini sudah dilengkapi dengan akses internet dan dilakukan perdagangan melalui internet, maka semua akan bisa mengaksesnya,” ungkap Syahrul.

Data yang kami peroleh dari Dinas Perindag Jatim, kata Syahrul, sejak awal penyelenggaraannya tahun 2003 sampai dengan Januari 2011 sudah melakukan 77 kali penyelenggaraan dengan nilai transaksi mencapai Rp. 2,35 triliun. “Dan diharapkan pada penyelenggaraan pasar lelang kali ini akan mencapai nilai transaksi yang lebih baik lagi, begitu juga dengan nilai realisasi transaksi maupun pelaku usahanya.”

Di pihak lain, Kepala Disperindag Jatim, Fattah Yasin, mengharapkan dengan penyelenggaraan pasar lelang yang dilaksanakan JGU menjadi salah satu sarana peningkatan nilai perdagangan antar pulau. Dan bahkan bisa menjadi media transaksi untuk tujuan ekspor.

“Kinerja perdagangan antar pulau Jatim cukup besar. Di tahun 2010, realisasinya mencapai Rp 200 triliun. Sedangkan realisasi ekspor ke berbagai negara yang mencapai US\$ 14 miliar,” kata Fattah.

Lebih jauh dijelaskan Fattah, realisasi perdagangan antar pulau Jatim meningkat cukup signifikan dibanding 2009 yang mencapai Rp 190 triliun. Dan dengan pelaksanaan pasar lelang ini, saya yakin kinerjanya akan menjadi semakin besar,” harapan Fattah.

Faktor Kunci

Senada dengan itu, Direktur Utama PT Jatim Caha Utama, Erlangga Satriagung, mengatakan, fasilitas perdagangan seperti pasar lelang merupakan faktor kunci pengembangan sektor pertanian dan perdagangan di masa depan.

“Keberadaan Puspa Agro dan kegiatan pasar lelang komoditi adalah instrumen yang semestinya bisa terus kita maksimalkan untuk menggenjot kinerja sektor pertanian. Ingat, salah satu kunci keberhasilan sektor pertanian adalah dari sisi pemasaran dan perluasan jaringan,” papar Erlangga.

Menuut Erlangga, Puspa Agro dan Pemprov Jatim terus berupaya meningkatkan kinerja industri agribisnis di Jatim. Hal ini antara lain terlihat dari upaya untuk mening-

katkan kualitas dan kuantitas PLKA yang diselenggarakan oleh Disperindag Jatim di Puspa Agro. “Pasar lelang komoditi ini sangat penting, mengingat sarana ini menjadi ajang bertemunya antara pelaku usaha dan petani dengan pembeli. Sehingga mereka bisa melakukan transaksi secara langsung. Untuk saat ini, pasar lelang masih kami selenggarakan di gedung yang nantinya akan kami gunakan sebagai tempat pertemuan antara petani dan pembeli. Dan nantinya kami berharap pada tahun 2012 pasar lelang ini akan memiliki gedung sendiri dengan fasilitas lengkap,” ujar Erlangga.

Rencananya, kata Erlangga lebih jauh, di lokasi Puspa Agro akan dibangun gedung pasar lelang yang dilengkapi dengan fasilitas gudang, pusat informasi dan teknologi informasi, laboratorium, dan tempat pelatihan.

Selain itu, lanjut Erlangga, Puspa Agro juga menargetkan bisa melakukan kegiatan ekspor komoditi pertanian mulai tahun 2012. Karena beberapa waktu yang lalu sudah ada permintaan dari China. Beberapa hari yang lalu, Duta Besar Thailand juga telah melakukan kunjungan ke Puspa Agro dan menyatakan ketertarikan mereka untuk membeli komoditas kelapa. “Konon berapapun jumlahnya mereka akan siap membeli.”

“Inilah potensi pasar Puspa Agro yang sudah ada di depan mata, oleh karena itu kami berharap dengan diselenggarakannya pasar lelang ini akan bisa meningkatkan kinerja sektor pertanian dan perdagangan Jatim,” pungkas Erlangga. ▲

AGENDA



Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu dan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, mewakili Presiden RI dalam menyampaikan surat kesediaan pembahasan RUU SRG dan RUU PBK, kepada Komisi VI DPR RI, 2 Februari 2011



Kepala Bappebti Syahrul R. Sempurnajaya berfoto bersama dengan Deddy Saleh beserta istri dalam acara pisah sambut Kepala Bappebti. Acara ini dihadiri para pelaku industri perdagangan berjangka dan sistem resi gudang. 28 Januari 2011



Kepala Bappebti Syahrul R. Sempurnajaya didampingi pejabat Eselon II Bappebti menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Kunjungan ini bertukar informasi berkaitan dengan sistem resi gudang. 8 Februari 2011



Kepala Bappebti Syahrul R. Sampurnajaya mengampaiakan sambutan dalam pengelenggaraan pasar lelang JaTim di Puspa Agro, Taman Sidoarjo. PLKA JaTim telah melakukan revitalisasi penyelenggaraan pasar lelang yang dikelola BUMD. 22 Februari 2011



Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya didampingi pejabat para Eselon II dan III Bappebti menerima kunjungan dari The World Bank yang diwakili oleh Mr. Srinivas (Lead Financial Economist), Mr. Enrique Aldaz Carroll (Senior Economist) dan Mr. The Fei Ming (Private Sector Development Specialis). Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh Direktur Utama PT. BBJ Made Sukarwo dan Direktur PT. BBJ M Bihar Sakti Wibowo. Pertemuan ini membahas perkembangan pasar komoditas dan peran Bursa Berjangka di Indonesia dalam pengendalian harga komoditas melalui mekanisme lindung nilai/hedging. 18 Februari 2011



Sekretaris Bappebti, Nizarli memberikan arahan sekaligus membuka Ujian Profesi Calon Wakil Pialang di Surabaya, JaTim. Peserta ujian profesi ini sebanyak 188 orang, yang berasal dari Jakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Makassar, Balikpapan dan Bali. 11-12 Februari 2011.

Dua 'PR' Retno Untuk Robert

Mantan Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Retno Rukmawati, kini telah menempati posisi baru di sebagai Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Sedangkan pejabat penggantinya yakni Robert James Bintaryo, yang semula menjabat Kepala Pusat Hubungan Masyarakat, Kementerian Perdagangan. Pelantikan pejabat baru di lingkungan Kementerian Perdagangan itu dilakukan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, pada 21 Februari 2011.

Sesaat meninggalkan posisinya sebagai Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Retno Rukmawati,

mengatakan, setidaknya ada dua PR- pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

"Hingga saat ini rasanya masih ada pekerjaan yang belum tuntas saya lakukan. Tetapi saya yakni, pejabat baru nantinya akan bisa melanjutkan pekerjaan yang belum tuntas itu," jelas Retno.

Menurut Retno Rukmawati, pekerjaan yang masih menggantung adalah kewajiban perusahaan pialang berjangka memenuhi peraturan transaksi kontrak multilateral minimal 5 persen. "Masih cukup banyak perusahaan pialang yang belum memenuhi kewajiban itu. Memang tidak mudah bagi perusahaan pialang untuk memenuhi kewajiban itu,

karenanya harus terus dilakukan pembinaan," tandas Retno.

Di samping itu, pekerjaan yang belum tuntas dilakukan Retno Rukmawati adalah menggiring perusahaan pialang berjangka untuk bertransaksi dalam skema penyaluran amanat ke bursa berjangka luar negeri (PALN).

"Saat ini ada dua perusahaan pialang berjangka yang mengajukan transaksi PALN. Sudah saya teliti dokumen perusahaan itu dan sudah siap, tinggal mendapatkan tandatangan dari Kepala Bappebti," jelas Retno Rukmawati.

Dua perusahaan pialang berjangka yang dimaksud yakni PT Sinar Mas Futures dan PT Phillip Futures. ▲

BKDI Perpanjang Masa Perdagangan GOLDGR

Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) per 18 Februari 2011 telah memperpanjang sesi transaksi kontrak berjangka emas atau yang dikenal dengan GOLDGR. Sesi perdagangan GOLDGR dibuka lebih awal dan ditutup lebih akhir, yaitu dari jam 07.00 hingga jam 04.30 hari berikutnya.

"Dengan perubahan sesi transaksi tersebut, seiring dengan jam perdagangan emas internasional, karena telah meliputi seluruh perdagangan emas di pasar Asia, Eropa, dan Amerika," jelas Dirut BKDI,

Megain Widjaya.

Menurut Megain, tujuan dilakukan perubahan sesi perdagangan GOLDGR yakni, untuk mempermudah dan memberi keleluasaan bagi para investor dan trader bertransaksi emas dengan mengikuti berbagai berita dari belahan dunia.

"Hal itu juga menjadi salah satu tugas BKDI sebagai sarana pembentuk harga (price discovery) untuk harga emas lokal akan semakin meningkat dan semakin terpercaya. Karena jam

perdagangan yang mendekati 24 jam penuh. Sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan harga emas lokal bisa langsung melihat transaksi yang terjadi secara real-time dimana saja," jelas Megain.

Dengan memperpanjang sesi transaksi GOLDGR, tambah Megain, memberi keuntungan bagi investor dari sisi kemudahan administratif dan penghematan biaya perdagangan. Di samping itu, jam perdagangan yang bersifat internasional ini akan menarik investor dan trader dari luar negeri untuk bertransaksi di BKDI. ▲

JFX Luncurkan Kontrak Emas Mini

Untuk meningkatkan animo pelaku pasar dalam transaksi kontrak berjangka multilateral, Jakarta Futures Exchange (JFX) kembali meluncurkan kontrak gulir emas berdenominasi dolar (KGEUSD).

Spesifikasi kontrak berjangka emas yang diluncurkan JFX tersebut lebih mini lagi dari kontrak yang sudah ada di bursa.

Menurut Direktur JFX, Bihar Sakti Wibowo, kontrak berjangka yang terbaru itu sebagai

respons atas besarnya peluang pasar dari kenaikan harga emas dunia belakangan ini. "Kontrak mini KGEUSD kami yakini akan diminati pelaku pasar, terutama pelaku pasar ritel."

Diluncurkannya kontrak terbaru JFX tersebut setelah memperoleh persetujuan dari Bappebti melalui surat No.15/Bappebti/SD/2011, tertanggal 10 Februari 2011. Persetujuan kontrak terbaru itu ditandatangani Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya.

Lebih jauh dikatakan Bihar, JFX mendapat persetujuan perubahan atas produk KGEUSD menjadi tiga jenis perubahan.

"Kalau sebelumnya KGEUSD itu hanya berukuran 100 troy ounce per lot, sekarang ada ukuran mini dengan jam perdagangan diperpanjang. Dengan demikian terdapat tiga jenis KGEUSD, yakni KGEUSD 100 troy ounce, KGEUSD 10 troy ounce, dan KGEUSD fix rate US\$10.000," jelas Bihar. ▲

Bappebti Siapkan Sanksi Tahap Kedua

Perusahaan pialang berjangka dan pedagang berjangka yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban minimal 5 persen transaksi kontrak berjangka multilateral, akan mendapatkan sanksi administrasi dari Bappebti. Terkait dengan kebijakan itu, Bappebti sudah berupaya toleran untuk tidak memberi sanksi berat.

Dan untuk mengengjot transaksi multilateral, Bappebti pun sudah menempuh berbagai upaya. Diantaranya, mendesak perusahaan pialang berjangka untuk membentuk divisi khusus transaksi multilateral serta melakukan edukasi dan sosialisasi.

Kepala Biro Hukum Bappebti, Alfons Samosir mengatakan, Bappebti akan melakukan tindakan tegas bagi perusahaan yang tidak mengikuti ketentuan mengenai kewajiban minimal transaksi multilateral 5 persen dari total transaksi di bursa setiap bulan. "Kami akan beri peringatan keras. Ini merupakan sanksi administrasi tahap dua. Kami telah memberikan toleransi

terhadap perusahaan pialang untuk mematuhi kebijakan itu."

"Otoritas sudah beri kesempatan kepada perusahaan pialang untuk melakukan sejumlah persiapan memenuhi kewajiban tersebut. Seperti mendirikan desk komoditi bersama team yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian bertransaksi kontrak multilateral," ujar Alfons.

Menurut data Bappebti, dari total perusahaan pialang berjangka anggota Jakarta Futures Exchange (JFX) saat ini ada berjumlah 66 perusahaan, dari sebanyak itu hanya 37 persen perusahaan pialang yang mentransaksikan kontrak berjangka multilateral periode Januari 2011. Sedangkan dari sisi volume, kontrak multilateral juga masih minim, yakni 0,7 persen atau 3.221 lot dari total transaksi yang terjadi di JFX pada periode Desember 2010 sebesar 434.463 lot.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia

(APBI) I Gde Raka Tantra, mengatakan, pihaknya cukup optimistis semakin banyak pialang yang akan bertransaksi kontrak multilateral. Karena mayoritas perusahaan pialang sudah menyiapkan tim khusus yang ditempatkan dalam desk komoditi, sesuai dengan peraturan Bappebti.

"Mungkin nanti pada akhir bulan Februari 2011 ini ada peningkatan signifikan untuk volume transaksi multilateral dan jumlah pialang yang bertransaksi," kata Gde.

Berkaitan dengan adanya sanksi, Gde berharap pemberian sanksi oleh Bappebti ini akan berbentuk surat peringatan, belum berbentuk pembekuan kegiatan usaha. "Jadi perlakuannya sama seperti saat perusahaan melakukan pelanggaran administrasi," jelas I Gde Raka Tantra. ▲

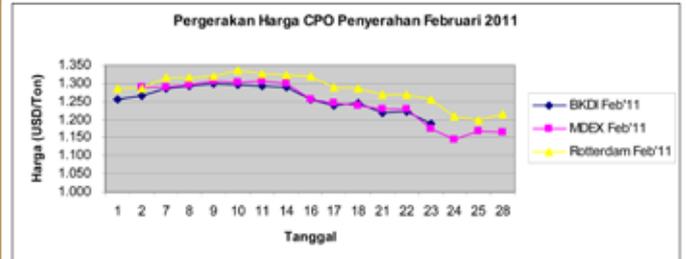
Harga CPO Fluktuatif

Menjelang pertengahan Februari 2011, harga CPO bergerak turun. Turunnya harga CPO juga diakibatkan oleh spekulasi pengetatan ekonomi China. China berupaya meredam inflasi dengan mengetatkan moneter. Setelah menaikkan suku bunga, pemerintah China pada 18 Februari mengumumkan kenaikan persyaratan cadangan perbankan. Hal ini dinilai bisa mengurangi konsumsi bahan baku di negara pengonsumsi terbesar minyak nabati ini. Selain itu, penurunan harga CPO juga disebabkan karena berkurangnya kecemasan pelaku pasar terhadap pasokan kedelai. Total produksi kedelai Brasil mungkin mencapai 71 juta metrik ton, naik dari tahun lalu sebesar 68,7 juta ton. Sementara, ekspor bisa naik 13% dari sebelumnya 33 juta ton. Pergeseran harga kedelai dapat mempengaruhi minyak sawit, sebab kedelai adalah substitusi minyak sawit. Seperti yang dilihat pada tabel diatas, harga CPO penyerahan Februari 2011 yang diperdagangkan di BKDI dibuka pada level harga US\$1256 per ton dan pada akhir perdagangan berada pada level harga US\$1188 per ton. Rata-rata harga CPO yang ditransaksikan di BKDI

berada pada level harga US\$1260 per ton dengan harga tertinggi US\$1299 per ton dan harga terendah US\$1188 per ton. Di Malaysia Derivatives Exchange (MDEX), harga rata-rata CPO yang ditransaksikan untuk penyerahan Februari 2011 berada pada level harga US\$1246 per ton, dan di Rotterdam US\$1283 per ton. Secara umum pergerakan harga CPO yang ditransaksikan di BKDI, MDEX dan Rotterdam menunjukkan tren yang sama.

Walaupun sempat terpuruk sampai pada level terendah di bulan ini, harga CPO kembali merangkak naik di akhir bulan Februari. Penyebab naiknya harga CPO dikarenakan pemasok utama seperti Indonesia dan Malaysia sedang mengalami cuaca yang tidak mendukung sehingga adanya prediksi mengenai turunnya produksi CPO dunia. Pada tahun 2011, baik Indonesia

dan Malaysia akan menurunkan jumlah produksi CPO, hingga 19 juta ton untuk Malaysia dan 22 juta ton untuk Indonesia. Berkurangnya jumlah produksi itu disebabkan terbatasnya lahan perkebunan kelapa sawit. Penguatan harga komoditi ini juga disebabkan oleh rencana China untuk mengisi kembali tangki cadangan minyak sawitnya yang hampir habis. China menyetok CPO untuk mencegah inflasi berlari semakin cepat. Pasar biasanya berspekulasi menaikkan harga ketika persediaan China sudah mulai menipis. China menyetok CPO untuk mencegah inflasi berlari semakin cepat. ▲

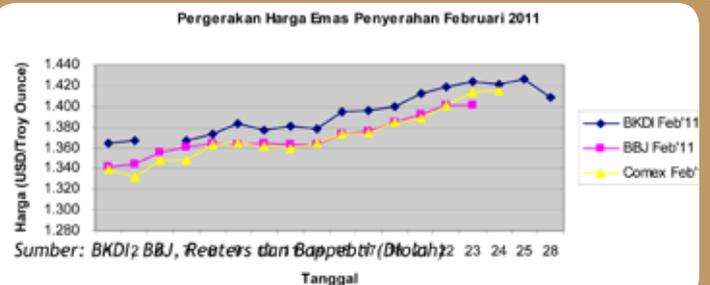


Sumber: BKDI, Reuters dan Bappebti (Diolah)

Emas Makin Berkilau

Selama Februari 2011, harga Emas cenderung mengalami peningkatan harga. Peningkatan harga Emas disebabkan karena banyak investor internasional yang telah beralih dan menganggap emas sebagai komoditi safe haven dibandingkan dengan investasi lainnya. Selain itu, peningkatan harga komoditi perhiasan ini juga disebabkan oleh menguatnya harga minyak mentah dunia akibat dari semakin memburuknya situasi di Libia dan kawasan Timur Tengah. Peningkatan permintaan emas yang tinggi dari negara-negara di Asia khususnya China dan India baik untuk perhiasan, teknologi, maupun investasi juga menjadi penyebab menguatnya harga emas. Di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), pada awal perdagangan untuk

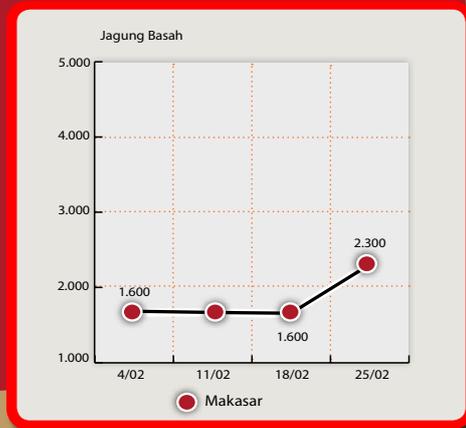
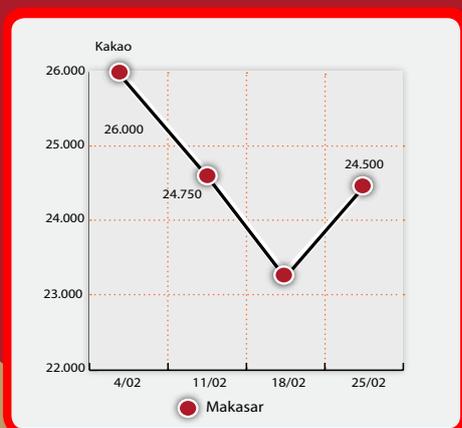
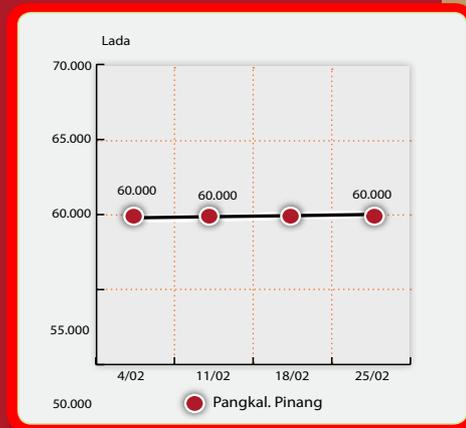
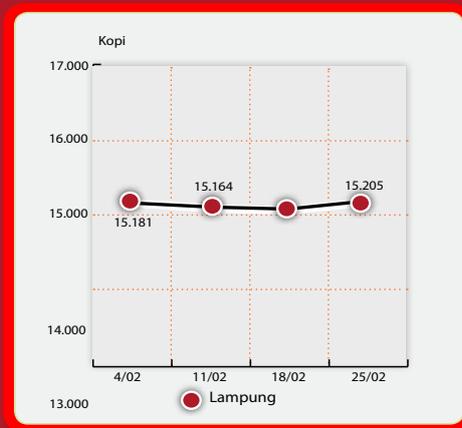
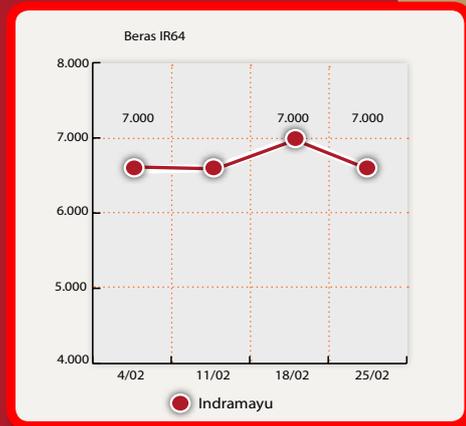
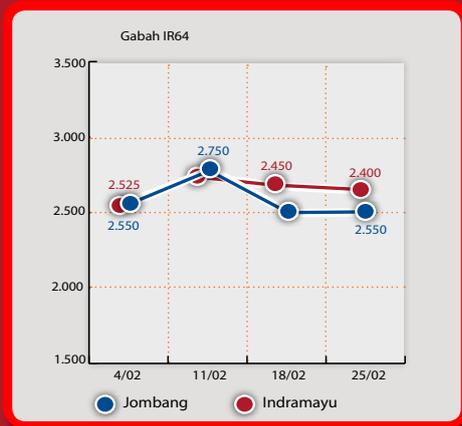
penyerahan Februari 2011, Emas dibuka pada level harga US\$ 1.364 per troy ounce dan di akhir perdagangan ditutup pada level harga US\$ 1.408 per troy ounce. Harga rata-rata Emas selama Februari 2011 berada pada harga US\$ 1.393 per troy ounce dengan harga tertinggi US\$ 1.426 troy ounce dan harga terendah US\$ 1.364 troy ounce. Untuk bulan penyerahan yang sama,



Sumber: BKDI, BBJ, Reuters dan Bappebti (Diolah)

harga rata-rata Emas di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) sebesar US\$ 1.370 per troy ounce., dengan harga tertinggi US\$ 1.401 per troy ounce. dan harga terendah US\$ 1.342 per troy ounce. Di COMEX, harga rata-rata Emas berjangka yang ditransaksikan berada pada level harga US\$ 1.371 per troy ounce. ▲

Harga Komoditi (Rp/Kg)



Aroma Nilam Manjakan Dunia

Dilihat dari bentuknya tanaman nilam tidak memiliki nilai ekonomis. Namun minyak atsiri tanaman semak ini paling dicari di seluruh dunia sebagai bahan baku parfum, kosmetik dan medis.

Masyarakat Indonesia mungkin sebagian besar belum banyak mengetahui tentang tanaman nilam. Pada hal tanaman ini paling banyak tumbuh di wilayah Indonesia. Dari berbagai literatur diketahui tanaman nilam berasal dari wilayah Filipina.

Nilam atau juga dikenal dengan (pogostemon patcchouli, atau pogostemon cablin benth alias pogostemon mentha), merupakan tumbuhan semak yang tingginya hanya mencapai 1 meter. Ciri dari tanaman ini dengan cabang yang banyak dan bertingkat mengitari batang, dan daunnya berbulu. Radius cabang melebar hingga 60 cm. Batangnya berkayu persegi empat dengan diameter 10-20 cm dan berwarna keungu-unguan. Sedangkan daunnya berwarna

hijau tersusun dalam pasangan berlawanan. Mempunyai bentuk bulat lonjong dengan panjang 10 cm, lebarnya sekitar 8 cm, ujungnya agak meruncing dan tangkai daunnya sekira 4 cm berwarna hijau kemerahan.

Nilam dapat tumbuh di mana saja dan bisa ditumpang-sarikan dengan tanaman lainnya. Namun, nilam akan tumbuh baik pada ketinggian 10 - 400 meter diatas permukaan laut. Nilam tidak haus air dan tahan kering, tapi nilam hanya menghendaki suhu 24 hingga 28 derajat Celcius dan mempunyai kelembaban lebih dari 75 % serta curah hujan yang merata sepanjang tahun 2.000 - 3.500 mm per tahunnya.

Minyak nilam diperoleh dengan cara penyulingan daun nilam yang berupa pachouilly alcohol 45 - 50 %. Penyulingan daun nilam dapat dilakukan dengan beberapa

cara, yaitu direbus, dikukus, dan penyulingan dengan uap.

Penyulingan direbus, daun nilam kering dimasukkan dalam ketel berisi air dan dipanasi. Kapasitas ketel penyulingan bervariasi, mulai dari 200 - 2000 ltr. Ketel dibuat dari bahan antikorosi seperti stainless steel, besi atau tembaga berlapis aluminium.

Menurut sejarawan, minyak nilam telah berabad-abad digunakan oleh masyarakat Asia seperti Indonesia, Malaysia, India, Madagaskar, Cina, dan sebagian wilayah Amerika Latin seperti masyarakat di Paraguay dan Brasil.

Tanaman nilam dibudidayakan untuk diperoleh minyak atsiri yang disebut minyak eteris atau minyak terbang (essensial oil, volatile). Minyak yang berasal dari nilam dimanfaatkan sebagai obat-obatan seperti anti septik, anti jamur, anti jerawat, obat eksim, dan kulit

pecah-pecah, serta ketombe, dan mengurangi peradangan. Bahkan, minyak nilam dapat membantu mengurangi kegelisahan, stres dan depresi, atau membantu penderita insomnia- gangguan susah tidur.

Selain itu, minyak nilam juga memiliki sifat afrodisiak yang dapat meningkatkan dan mendorong gairah seksual.

Seiring dengan perkembangan teknologi, di India daun nilam kering digunakan sebagai pengharum pakaian dan permadani. Malahan, masyarakat India cukup banyak menggunakan rebusan atau jus daun nilam sebagai obat batuk dan asma. Sedangkan remasan akarnya untuk obat rematik dengan dioleskan pada bagian yang sakit. Serta remasan daunnya juga manjur untuk obat bisul dan sakit kepala.

Sedangkan masyarakat Eropa dan Amerika, menggunakan minyak nilam sebagai bahan baku industri pembuatan minyak wangi. Pada minyak wangi atau parfum, minyak nilam berperan sebagai pengikat bau atau fikative parfum, demikian pula untuk produk-produk kosmetik.

Berdasarkan hasil laporan dari Market Study Essential Oils and Oleoresin, bahwa produksi minyak nilam dunia mencapai 500 - 550 ton per tahun. Dari produksi dunia sebanyak itu, Indonesia adalah negara pengekspor minyak nilam terbesar di dunia dengan kapasitas sekitar 450 ton per tahun. Sedangkan Cina, produksinya berkisar 50 - 80 ton per tahun.

Harga minyak nilam dipasaran internasional saat ini berkisar Rp 1.200.000 per kg. Sedangkan di tingkat petani atau pengrajin berkisar Rp 250.000 hingga Rp 300.000 per kg.

Sentra produksi minyak nilam di Indonesia terdapat di Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Suplai minyak nilam dari tiga daerah ini mencapai 80 % dari total produksi Indonesia. Dan, seluruh produksi itu ditujukan untuk pasar ekspor. Negara tujuan ekspor nilam meliputi Singapura, India, AS, Inggris, Belanda, Prancis Jerman, Swiss, dan Spanyol.

Daerah lain yang sedang mengembangkan komoditi ini diantaranya adalah Bengkulu, Lampung dan beberapa daerah di Pulau Jawa, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat. ▲



Manfaat Minyak Nilam

1. Minyak nilam yang paling umum digunakan adalah sebagai pengusir stres. Oleh karena itu penggunaan secara teratur minyak nilam akan membuat Anda lebih tenang dan nyaman.

2. Minyak nilam memiliki aroma yang unik. Aroma itu bisa langsung menyentuh pikiran dan jiwa. Itu sebabnya minyak nilam digunakan untuk membuat dupa dan parfum. Untuk menghasilkan aroma minyak nilam yang unik, minyak dapat dicampur dengan minyak lain seperti cendana, mawar, melati, mur dan jeruk.

3. Minyak ini juga digunakan untuk pijat atau aromaterapi. Pijat dengan minyak nilam dapat menenangkan pikiran dan jiwa, saraf santai dan yang paling penting mengurangi stres. Dalam kasus dermatitis dan depresi, minyak nilam adalah obat mujarab terbaik.

4. Minyak ini juga digunakan untuk penyembuhan berbagai masalah kulit seperti psoriasis, eksim dan dermatitis. Hal itu karena minyak nilam memiliki sifat antiseptik sehingga menyembuhkan luka relatif dini. Selain itu, minyak mencegah luka dari infeksi lebih lanjut.

5. Minyak ini memiliki sifat anti penuaan dini. Itu sebabnya minyak nilam banyak digunakan sebagai produk perawatan kulit yang luar biasa. Minyak membuat kulit muda dan sehat. Bekas luka jerawat dan jenis lainnya masalah kulit istimewa adalah dihinda-

ri. Minyak juga terus memeriksa pada kulit kering dan keriput.

6. Minyak nilam juga dapat menyegarkan bau tubuh. Oleh sebabnya banyak digunakan sebagai deodoran.

7. Tidak banyak yang akan percaya tapi nyatanya nilam dapat digunakan untuk membersihkan rumah dari serangga. Hal itu karena minyak ini memiliki sifat insektisida, yang digunakan untuk memuat terhampar serangga di rumah tangga. Nilam digunakan dalam semprotan, alat penguap dan nyamuk-repellents.

8. Nilam melindungi kulit Anda dari berbagai jenis kerusakan. Minyak ini juga dapat menyembuhkan luka bakar, luka dan bisul. Secara reguler penggunaan minyak bisa menghilangkan bekas luka atau tanda sisa dari penyakit campak dan cacar.

9. Manfaat lain minyak nilam untuk mengobati masalah seksual seperti hilangnya libido, impotensi, masalah ereksi, frigiditas. Selain itu, menurunkan kolesterol dan membantu dalam menurunkan berat badan.

10. Minyak nilam juga dapat bermanfaat dalam pengobatan seperti batuk, mual, diare dingin, dan sakit kepala. Pada saat demam terutama disebabkan oleh beberapa infeksi, nilam adalah obat terbaik.

11. Minyak ini juga membantu dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melawan infeksi. ▲



Pepper price information SMS service

International Pepper Community launched distribution system for pepper commodity price information via short messaging service (SMS) or short text message to farmer and local broker. This is to inform the pepper farmer of the market fair price.

Gusmardi Bustami, chief of International Pepper Community (IPC), spoke that farmer needs to always receive the information of recent price; therefore they will not be suffered for financial loss when selling their commodity.

"Indonesia has the importance of delivering the current price to farmer therefore they know the fair & proper price" said by Gusmardi Bustami who is also Directorate General of International Trading Cooperation for

Trade Ministry.

According to Gusmardi, currently Indonesia is in the second position of the largest pepper producer country in the world. In 2010, the number of pepper farmer reached 328.060 people, spread out in Lampung, Bangka, South Sumatra, North Sumatra, Kalimantan and Sulawesi.

The pepper price information provided by IPC includes black and white pepper production centre in some areas & countries, each pepper price from Lampung & Bangka – Indonesia, Cochin – India, Ho Chi Minh City – Vietnam and Serawak – Malaysia. The price information method via SMS is conducted by collecting daily price from member country such as Brazil, India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, and Vietnam. That price infor-

mation has been converted to each country's currency.

"For Indonesia, firstly we will convert the price information to US dollar using the median rate of the central Bank - BI. After that with the same median rate from BI, the price is converted to rupiah and then distributed via SMS" Gusmardi said.

IPC Executive Director, S. Kannan, said, for early stage they will send the pepper price reference information to 100 farmers and local brokers periodically every week. "Other farmers and local brokers who want to have this service can apply it to IPC. For commercial applicant, there will be charge applicable for each SMS, but it will be free for farmer." S. Kannan said. ▲

The movement of Indonesian two Futures Exchanges

Indonesian Commodity Futures Trading starts to show their potential. It can be seen from the growth of future exchange transaction volume in Indonesian two Futures Exchanges, Jakarta Futures Exchanges (JFX) and Bursa Komoditi and Derivatif Indonesia (BKDI).

Mainly since BKDI operationally started in November 2009, the primer commodity futures contract showed its significant futures trading growth. BKDI transaction in 2010 reached 216.848 lots. BDKI total trans-

action is the result of CPO contract trading launched in May 2010 for 193.563 lots and Gold contract for 23.285 lots.

Meanwhile, JFX total primer commodity futures trading contract throughout 2010 reached 15.949 lots. The total transaction is the result of 8 JFX's commodity contracts. The biggest volume of JFX futures contract transaction was from bilateral transaction or alternative trading system transaction (SPA). For SPA transaction, JFX trading volume reached 5.393.768 lots or equal with 99.57% from the

whole total of transaction.

From the achievement of transaction volume of those two futures trading in 2010, we can predict in 2011 they will be increased more significantly. This is in relates to a plan of some futures contracts new release from the two exchanges and the effectiveness of JFX multilateral trading system. On the other hand, the futures trading authority expands the commodity futures transaction from foreign exchange in commission distribution scheme to overseas exchange (PALN). ▲

Coftra requires education division in Exchange

Coftra will require special division in education to drive futures exchanges to be more proactive. This futures trading authority will establish sanction if futures exchange didn't implement the education.

"Coftra will arrange futures exchange to be more proactive to run education on futures commodity. If they didn't implement it, we will estab-

lish sanction the same as when broker did an administrative breach." said Chife of Coftra Law Bureau, Alfons Samosir.

Alfons said Coftra drives futures exchange in Indonesia to run education in developing multilateral futures contract transaction. "Person who assigned in this education division has to be someone who has depth understanding of commodity futures

trading."

"The education can be established as training and workshop in international scale. Futures Exchange has to visit potential area and build exchange counter to represent them. Besides that, exchange needs to collaborate with educational institution such as institute and university in each areas." said Alfons. ▲

Government will develop WRS in Banten area

Government is planning to implement the Warehouse Receipt System (WRS) for rice commodity in Banten province to cut the link of distribution and plunger. The WRS system can give competitive sale price for farmer and also expand distribution range through auction selling in auction market.

"We will try to link the auction market with Warehouse Receipt System. In Banten we actually facilitate some warehouses to implement this system." Said Gunaryo the Direc-

torate General of National Trading for Trade Ministry, when he visited Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang, Banten.

He also added that with the presence of WRS, farmers do not have to be in rush to sell their yields crop because they can store it in the warehouse. When they store in warehouse, the warehouse manager will issue receipt that can be used as warrant to the bank if they want to have a cheap loan.

"WRS is one of mechanisms to control price because this

system is transparent in controlling price margin in every section. Hence, it cut plunger's link and as the result farmer and consumer can have the benefit of proper price." Gunaryo explained.

Gunaryo also ensured that the commodity quality in WRS is guaranteed because the warehouse is equipped by modern technology that can measure the commodity quality and on the other hand, the warehouse is also insured. ▲



Pandangan Hukum Islam Terhadap PBK

Pengantar Redaksi; Indonesia sebagai negara terbesar pemeluk agama Islam, sebagian besar umatnya masih meragukan kehalalan praktik perdagangan berjangka. Bagaimana menurut pandangan para pakar Islam? Apa pendapat para ulama mengenai perdagangan berjangka komoditi (PBK), trading forex, trading index dan saham? Apakah halal menurut hukum Islam? Mari kita simak pendapat para pakar Islam terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti di bawah ini.

Keraguan umat Islam terhadap praktik PBK pada dasarnya bersumber dari

hadits riwayat Abu Hurairah, yang mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, 'Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.'

Oleh sementara fuqaha (ahli fiqih Islam), hadits tersebut ditafsirkan secara saklek. Pokoknya, setiap praktik jual beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad, haram. Penafsiran secara demikian itu, tak pelak lagi, membuat fiqih Islam sulit untuk memenuhi tuntutan jaman yang terus berkembang dengan perubahan-perubahannya.

Karena itu, sejumlah ulama klasik yang terkenal dengan pemikiran cemerlangnya, menentang cara penafsiran yang terkesan sempit tersebut. Misalnya, ulama Ibn al-Qayyim. Ulama bermazhab Hambali ber-

pendapat, bahwa tidak benar jual-beli barang yang tidak ada dilarang. Baik dalam Al Qur'an, sunnah maupun fatwa para sahabat, larangan itu tidak ada.

Dalam Sunnah Nabi, hanya terdapat larangan menjual barang yang belum ada, sebagaimana larangan beberapa barang yang sudah ada pada waktu akad. "Causa legis atau ilat larangan tersebut bukan ada atau tidak adanya barang, melainkan garar," ujar Dr. Syamsul Anwar, MA dari IAIN SUKA Yogyakarta menjelaskan pendapat Ibn al-Qayyim.

Garar adalah ketidakpastian tentang apakah barang yang diperjual-belikan itu dapat diserahkan atau tidak. Misalnya, seseorang menjual unta yang hilang. Atau menjual barang milik orang lain, padahal tidak diberi kewenangan oleh yang bersangkutan.

Jadi, meskipun pada waktu akad barangnya tidak ada, namun ada kepastian diadakan pada waktu diperlukan sehingga bisa diserahkan kepada pembeli, maka jual-beli tersebut sah. Sebaliknya, kendati barangnya sudah ada tapi - karena satu dan lain hal tidak mungkin diserahkan kepada pembeli, maka jual beli itu tidak sah.

Jadi, praktik perdagangan berjangka, jelas bukan garar. Sebab, dalam kontrak berjangkanya, jenis komoditi yang dijual-belikan sudah ditentukan. Begitu juga dengan jumlah, mutu, tempat dan waktu



penyerahannya. Semuanya berjalan di sesuai dengan aturan resmi yang dari badan pengawas dan bursa, sebagai antisipasi terjadinya praktik penyimpanan berupa penipuan.

Dalam perspektif hukum Islam, PBK dapat dimasukkan ke dalam kategori almasa'il almu'ashirah atau masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Karena itu, status hukumnya dapat dikategorikan kepada masalah ijthadiyah. Klasifikasi ijthadiyah masuk ke dalam wilayah fi ma la nasha fih, yakni masalah hukum yang tidak mempunyai referensi nash hukum yang belum pasti.

Dalam kategori masalah hukum al-Sahrastani, ia termasuk ke dalam paradigma al-nushush qad intahat wa al-waqal la tatanahi. Artinya, nash hukum dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah sudah selesai; tidak lagi ada tambahan. Dengan demikian, kasus-kasus hukum yang baru muncul mesti diberikan kepastian hukumnya melalui ijthad.

Dalam kasus hukum PBK, ijthad dapat merujuk kepada teori perubahan hukum yang diperkenalkan oleh Ibn Qoyyim al-Jauziyyah. Ia menjelaskan, fatwa hukum dapat berubah karena beberapa variabel perubahannya, yakni: waktu, tempat, niat, tujuan dan manfaat. Teori perubahan hukum ini diturunkan dari paradigma ilmu hukum dari gurunya Ibn Taimiyyah, yang menyatakan bahwa a-haqiqah fi al-'yan la fi al-adzhan. Artinya, kebenaran hukum itu dijumpai dalam kenyataan empirik; bukan dalam alam pemikiran atau alam idea.

Paradigma ini diturunkan dari prinsip hukum Islam tentang keadilan yang dalam Al Quran digunakan istilah al-mizan, a-qisth, al-wasth, dan al-ad.

Dalam penerapannya, secara khusus masalah PBK dapat dimasukkan ke dalam bidang kajian fiqh al-siyasah maliyyah, yakni politik hukum kebendaan.

Dengan kata lain, PBK termasuk kajian hukum Islam dalam pengertian bagaimana hukum Islam diterapkan dalam masalah kepemilikan atas harta benda, melalui perdagangan berjangka komoditi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas.

Realisasi yang paling mungkin dalam rangka melindungi pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi dalam ruang dan waktu serta pertimbangan tujuan dan manfaatnya dewasa ini, sejalan dengan semangat dan bunyi UU No. 32/1997 tentang PBK.

Karena teori perubahan hukum seperti dijelaskan di atas, dapat menunjukkan elastisitas hukum Islam dalam kelembagaan dan praktek perekonomian, maka PBK dalam sistem hukum Islam dapat dianalogikan dengan bay' al-salam'ajl bi'ajil.

Bay' al-salam dapat diartikan sebagai berikut. Al-salam atau al-salaf adalah bay' ajl bi'ajil, yakni memperjualbelikan sesuatu yang dengan ketentuan sifat-sifatnya yang terjamin kebenarannya. Di dalam transaksinya pun penyerahan ra's al-mal dalam bentuk uang sebagai nilai tukar didahulukan daripada penyerahan komoditi yang dimaksud dalam transaksi itu.

Terkait itu, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan sebagai berikut, "akad atas komoditas jual beli yang diberi sifat terjamin yang ditangguhkan (berjangka) dengan harga jual yang ditetapkan di dalam bursa akad".

Keabsahan transaksi jual beli berjangka, ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat sebagai berikut:

- a) Rukun sebagai unsur-unsur utama yang harus ada dalam suatu peristiwa transaksi. Unsur-unsur utama di dalam bay' al-salam adalah: pihak-pihak pelaku transaksi ('aqid) yang disebut dengan istilah muslim atau muslim ilaih. Objek transaksi (ma'qud alaih), yaitu barang-barang komoditi berjangka dan harga tukar (ra's al-mal al-salam dan al-muslim fih). Kalimat transaksi (Sighat 'aqad), yaitu ijab dan kabul. Yang perlu diperhatikan dari unsur-unsur tersebut, adalah bahwa ijab dan qabul dinyatakan dalam bahasa dan kalimat yang jelas menunjukkan transaksi berjangka. Karena itu, ulama Syafi'iyah menekankan penggunaan istilah al-salam atau al-salaf di dalam kalimat-kalimat transaksi itu, dengan alasan bahwa 'aqd al-salam adalah bay' al-ma'dum dengan sifat dan cara berbeda dari akad jual dan beli (buy).
- b) Syarat-syarat. Persyaratan menyangkut objek transaksi, adalah: bahwa objek transaksi harus memenuhi kejelasan mengenai: jenisnya (an yakun fi jinsin ma'lumin), sifatnya, ukuran (kadar), jangka penyerahan, harga tukar, tempat penyerahan.

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh harga tukar (al-tsaman), adalah, pertama, kejelasan jenis alat tukar, yaitu dirham, dinar, rupiah atau dolar dsb atau barang-barang yang dapat ditimbang, disukat, dsb. Kedua, kejelasan jenis alat tukar apakah dengan mata uang Rupiah, Dolar Amerika, Dolar Singapura, dan lainnya. Apakah timbangan yang disepakati dalam bentuk kilogram, pond, dan lainnya.

Kejelasan tentang kualitas objek transaksi, apakah kualitas istimewa, baik sedang atau buruk. Syarat-syarat di atas ditetapkan dengan maksud menghilangkan jahalah fi al-'aqd atau alasan ketidaktahuan kondisi-kondisi barang pada saat transaksi. Sebab hal ini akan mengakibatkan terjadinya perselisihan di antara pelaku transaksi, yang akan merusak nilai transaksi.

Kejelasan jumlah harga tukar. Penjelasan singkat di atas nampaknya telah dapat memberikan kejelasan kebolehan PBK. Kalaupun dalam pelaksanaannya masih ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka dapatlah digunakan kaidah hukum atau legal maxim yang berbunyi: ma la yudrak kulluh la yutrak kulluh. Apa yang tidak dapat dilaksanakan semuanya, maka tidak perlu ditinggalkan keseluruhannya.

Dengan demikian, hukum dan pelaksanaan PBK sampai batas-batas tertentu boleh dinyatakan dapat diterima atau setidaknya-tidaknya sesuai dengan semangat dan jiwa norma hukum Islam, dengan menganalogikan kepada bay' al-salam. (disarikan dari berbagai sumber) ▲

Komoditi Murabahah New Insight of Jakarta Future Exchange

Dr. Perdana Wahyu Santosa

Lembaga Perekonomian dan Keuangan MUI – Pusat dan Universitas YARSI

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada 9 Februari 2011, telah terjadi momentum perjanjian penting antara Jakarta Future Exchange (JFX)- PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Inti perjanjian tersebut terkait dengan perencanaan, perancangan dan implementasi sistem perdagangan komoditi murabahah. Oleh karena itu, momentum ini layak masuk ke dalam catatan penting perjalanan JFX, karena merupakan cakrawala sekaligus langkah baru sebagai pelopor komoditi syariah di Indonesia. Dalam hal ini, JFX dan DSN diharapkan dapat menemukan sinergi positif dalam penyelenggaraan perdagangan kontrak berjangka komoditi berdasarkan pasar fisik (bursa komoditi).

Dalam pelaksanaannya, JFX-DSN tetap mengacu peraturan dan perundangan perdagangan berjangka komoditi yang berlaku saat ini. Kerjasama ini juga diketahui, disetujui dan direstui oleh Kementerian Perdagangan RI yang mana pada saat penanda-tanganan MOU yang bersamaan dengan peresmian gedung baru JFX disaksikan

langsung oleh Dr. Marie Elka Pangestu dan juga pejabat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Misi dan Visi Komoditi Murabahah

Salah satu bagian terpenting dari kerjasama ini adalah penyatuan misi dan visi para pihak terkait masa depan dan prospek bisnis perdagangan berjangka komoditi murabahah. Mengingat begitu besarnya potensi bisnis komoditi syariah ini apabila dikelola secara profesional maka penetapan misi dan visi dalam kerangka goal congruence merupakan hal yang mutlak.

Visi utama dari kerjasama ini adalah meningkatkan volume perdagangan komoditi murabahah dalam rangka terkoneksiya potensi pasar komoditi tradisional dengan pasar finansial (futures exchange). Hal ini sangat penting karena Indonesia mempunyai potensi komoditi yang sangat besar dan terdiversifikasi luas.

Sedangkan misi utama peluncuran produk komoditi murabahah ini adalah pengembangan bisnis perdagangan berjangka berbasis syariah dalam perdagangan komoditi di Indonesia sebagai salah satu pilar penting perekonomian In-

donesia.

Gambaran Ringkas Komoditi Murabahah

Kali pertama yang perlu kita pahami adalah pengertian umum tentang pasar berjangka komoditi murabahah. Secara umum, pasar berjangka komoditi murabahah adalah tempat berikut sarana dan prasarana penunjangnya yang menjadi fasilitator kontrak jual beli komoditi yang disepakati saat ini terkait harga (spot price), kuantitas, kualitas, syarat pembayaran, serta syarat penyerahan (deliver) di mana pelaksanaannya dapat dilakukan dikemudian hari sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.

Demikian pula produk yang diperjualbelikan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Mekanisme transaksinya melibatkan perbankan syariah dan JFX. Investor komoditi murabahah harus menjadi salah satu nasabah bank syariah terlebih dahulu.

Tujuan utama dari kontrak murabahah ini adalah mengeliminasi faktor-faktor pemicu ketidakpastian di masa depan yang disebabkan dinamika perekonomian baik bagi produsen, konsumen dan pedagang (trader) serta perbankan syariah.

Kontrak dilakukan secara standar sesuai peraturan, perundangan dan fatwa DSN MUI dan dapat dilakukan antara individu atau lembaga/perusahaan dengan persyaratan spesifik yang disepakati para pihak. Sedangkan anggota bursa komoditi syariah ini meliputi produsen (supplier), konsumen (nasabah bank syariah), dan JFX (fasilitator perdagangan). Dalam proses kontrak berjangka murabahah ini perbankan syariah dapat mengambil peran penting sesuai skim yang telah disetujui pihak JFX-DSN.

Secara umum, kontrak komoditi murabahah dilandasi transaksi pendanaan perbankan (syariah) dengan ekspektasi memberikan imbalan tetap (fixed return) dan dapat disepakati (diperjanjikan) pada awal kepada nasabah. Prinsip pendanaan dan transaksinya menggunakan konsep akad wakalah dan murabahah. Bagi perbankan syariah, manfaat komoditi murabahah berjangka tersebut adalah:

- Meningkatkan daya saing produk perbankan syariah
- Diversifikasi dan pengembangan produk perbankan syariah
- Menyalurkan dana nasabah yang idle pada investasi yang aman dan produktif
- Instrumen likuiditas perbankan syariah Sedangkan kriteria umum komoditi yang dapat ditransaksikan meliputi:
- Sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah DSN MUI.
- Komoditas milik produsen yang tersimpan dan terawatt dengan baik dalam gudang (Idle stock).
- Komoditas yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi adalah komoditas yang dibeli oleh Trader untuk kepentingan transaksi atau yang ditawarkan supplier.

Transaksi perdagangan berjangka murabahah harus dilandasi pasar fisik dan jika investor/ nasabah menginginkan maka dapat dilakukan physical delivery sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak.

Konsep Operasional Murabahah Berjangka

Implementasi perdagangan berjangka syariah ini dioperasikan terpisah oleh JFX melalui unit atau divisi mekanisme perdagangan komoditas murabahah tersendiri. Sekali pun unit atau divisi syariah ini merupakan bagi antak terpisahkan dari manajemen JFX namun direncanakan memiliki manajemen khusus syariah yang otonom dan beberapa dewan pengawas syariah yang kompeten di bidangnya.

Rancangan skema dasar alur model bisnis komoditi murabahah di JFX yang sedang dikembangkan bersama DSN MUI saat ini adalah sebagai berikut:

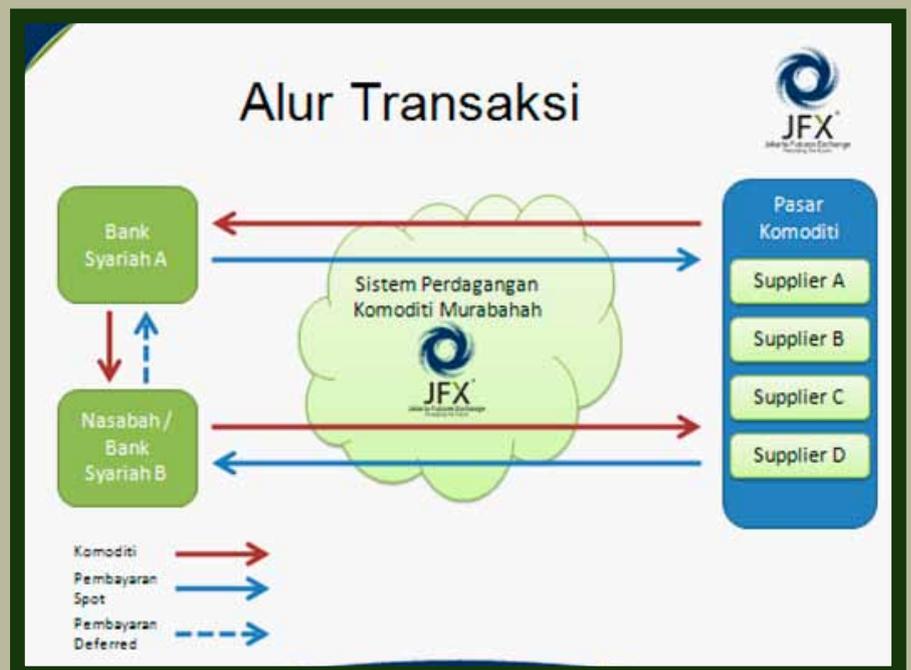
Mekanisme alur transaksi konseptual yang masih dalam pengkajian dan pengembangan antara JFX-DSN melibatkan beberapa pelaku (agen ekonomi syariah). Agen ekonomi yang menjadi pelaku operasional perdagangan komoditi murabahah terdiri dari Perbankan Syariah, Nasabah/Investor komoditi, JFX dan penjual (supplier) komoditi itu sendiri. Seluruh bank syariah diharapkan terlibat sehingga struktur pasar membentuk persaingan yang lebih sehat dan jumlah supplier komoditi diharapkan juga

besar sehingga mekanisme pembentukan spot price lebih efisien. Selain itu diversifikasi produk juga harus beragam sehingga nasabah/ investor mempunyai banyak pilihan yang lebih luas lagi.

Manfaat Komoditi Murabahah

Produk baru JFX ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih signifikan bagi perekonomian nasional terkait dengan:

- Manfaat ketahanan pangan dan komoditas penting nasional akan meningkat
- Produksi Pertanian, Perkebunan, dan pertambangan dapat lebih diprediksi sesuai ekspektasi produsen maupun pembeli
- Fluktuasi harga komoditas dapat distabilisasikan lebih optimal sehingga terhindar dari unsur spekulasi atau gambling.
- Fungsi distribusi komoditas lebih variatif dan efisien sehingga konsumen perusahaan lebih aman dalam financial planningnya
- Dapat melindungi para agen ekonomi dari bermacam ketidak-pastian melalui komoditas murabahah atau hedging.▲



Widuri Dwi Susanti

Divisi Komoditi Tingkatkan Kepercayaan Investor

Muda, energik dan komunikatif itulah yang terlintas sekilas mengenal sosok Widuri Dwi Susanti, Kepala Divisi Komoditi PT Danpac Futures. Dan bicara lebih teknis lagi tentang perdagangan berjangka komoditi, Widuri, begitu dia disapa, ternyata cukup menguasai seluk beluk industri ini.

"Yang jelas, saya akan terus belajar dan menggali pengetahuan tentang perdagangan berjangka komoditi. Karena saya diberi kepercayaan dan kesempatan oleh perusahaan untuk memimpin divisi ini. Itulah sebab saya tidak akan menyalahgunakan kesempatan ini," tegas Widuri.

Meski transaksi multilateral volumenya belum maksimal diperdagangkan PT Danpac Futures, tetapi dengan adanya Divisi Komoditi transaksi perusahaan ini menunjukkan tren yang signifikan.

Menurut Widuri, total transaksi Danpac masih didominasi transaksi bilateral yang mencapai 90 persen. Sedangkan sisanya 10 persen merupakan transaksi multilateral.

"Tetapi kami cukup yakin kok, transaksi multilateral akan terus berkembang di masa depan. Karena pada dasarnya investor selama ini belum mendapatkan informasi yang lengkap tentang perdagangan komoditi," tandas Widuri.

Divisi Komoditi PT Danpac Futures berdiri sejak bulan Agustus 2010, dan pada divisi ini terdapat se-

banyak empat personil yang mengelola investor untuk bertransaksi multilateral.

Profil para investor yang bertransaksi multilateral di perusahaan kami memang mayoritas para pelaku pasar fisik. Mereka bertransaksi untuk tujuan lindung nilai. Tetapi mereka cukup aktif keluar-masuk pasar sehingga pasar lebih bergairah, tambah Widuri.

"Dari pengalaman kami mendampingi para investor yang bertransaksi multilateral, pada dasarnya mereka sudah sangat mengerti proses transaksi di bursa berjangka. Itu dikarenakan sistem teknologi perdagangan yang digunakan real time dan fasilitasnya cukup. Sehingga mereka bisa setiap saat memantau pasar dan melakukan eksekusi," terangnya.

Dikatakan Widuri, strategi yang digunakannya untuk merangkul para calon investor pada dasarnya sangat sederhana. "Yang jelas kami harus memahami betul dengan produk atau kontrak yang akan ditawarkan. Kemudian menguasai pasar dengan teknik-teknik analisa. Bila hal itu bisa dilakukan, dengan sendirinya tingkat kepercayaan investor akan bertambah dan yakni untuk bertransaksi."

"Saat ini PT Danpac Futures memiliki cabang disebanyak lima. Satu di Bali dan Bandung, Surabaya ada dua cabang dan di Jakarta ada satu cabang. Sedangkan kedudukan Divisi Komoditi berada di kantor pusat. Kalau ada nasabah yang hendak bertransaksi multilateral dari kantor cabang dan perlu mendapatkan dukungan, maka tim

Divisi Komoditi akan turun ke cabang tersebut."

Uniknya, kata Widuri, investor yang bertransaksi multilateral di PT Danpac Futures kebanyakan dari daerah. Dan, pada umumnya mereka adalah para pemain pasar fisik.

Dijelaskan Widuri, hingga saat ini para investor yang bertransaksi kontrak multilateral dari produk Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). "Kami juga menawarkan produk yang ada di Jakarta Futures Exchange (JFX), tetapi karena sistem perdagangannya yang belum maksimal, mereka belum mau."

Diungkapkan Widuri, Tim Divisi Komoditi PT Danpac Futures cukup mendapatkan perhatian dari manajemen. Hal itu dengan adanya stimulus yang diberikan perusahaan untuk merangsang anggota tim agar berkreatasi menggenjot transaksi multilateral. "Stimulus yang diberikan perusahaan cukup membuat kami tertantang."

Widuri Dwi Susanti yang mengaku masih single ini, terjun diindustri perdagangan berjangka komoditi sejak tahun 2005 di salah satu perusahaan pialang berjangka anggota JFX. Lepas dari perusahaan itu, tahun 2008 hingga saat ini bergabung dengan PT Danpac Futures.

Bicara soal obsesi, wanita kelahiran Solo, Jateng, bulan Oktober 1981, ini, tidak terlalu tinggi-tinggi. "Dalam jangka pendek saya ingin melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Atasan saya sudah memberi peluang untuk itu, tetapi waktu saya yang belum bisa diatur," harapnya. ▲